

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan akan membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan berilmu. Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Agar tujuan tersebut dapat terwujud tentu membutuhkan pendidikan yang berkualitas baik dari sarana dan prasarana serta dari tenaga pendidiknya.

Akan tetapi faktanya tidak semua sekolah memiliki kualitas dan mutu yang sama. Sehingga berkembang persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Para orang tua berlomba-lomba ingin supaya anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit karena mereka mempunyai anggapan sekolah favorit memiliki mutu pendidikan yang bagus. Tentu saja untuk dapat bersekolah di sekolah favorit butuh kompetensi yang bagus pula sehingga tidak semua siswa bisa masuk ke sekolah tersebut. Keadaan ini menimbulkan kecurangan, terdapat oknum yang memperjual belikan bangku sekolah. Hal tersebut terjadi karena dikotomi sekolah (favorit dan tidak favorit).

Passing grade adalah nilai terendah dari calon siswa yang mendaftar pada setiap SMA. Hal ini diperoleh dengan cara mengurutkan peringkat nilai NEM para calon siswa yang daftar mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Nilai dari para calon siswa yang diterima (lolos) pada urutan terakhir, itulah nilai minimum untuk SMA yang dimaksud. Dengan demikian nilai minimum

tersebut akan berubah setiap tahunnya (Utami, Ema dan Permana, C. Yedi, 2008 : 127). Setiap sekolah memiliki *passing grade* yang berbeda dengan sekolah lainnya. *Passing grade* ini merupakan persentasi nilai yang digunakan sebagai patokan untuk memasuki sekoah tertentu. Nilai ini didapat dari hasil akumulasi dan rata-rata setiap nilai calon peserta didik yang mendaftar. *Passing grade* yang digunakan sebagai patokan peserta didik yang ingin mendaftar ke sekolah tersebut. Setiap sekolah memiliki nilai *passing grade* yang berbeda, pada suatu sekolah juga memiliki nilai yang berbeda setiap tahunnya. Hal ini karena nilai *input* atau nilai peserta didik yang mendaftar pada sekolah tersbut setiap tahunnya berbeda sehingga hasil akumulasi (*passing grade*) juga berbeda. Berikut adalah nilai *passing grade* SMA Negeri di Kota Bandung :

Tabel 1.1

Passing Grade SMA Negeri di Kota Bandung

SEKOLAH	PASSING GRADE					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMA NEGERI 1 BANDUNG	33.7	35.5	35.5	34.5	33.9	34.9
SMA NEGERI 2 BANDUNG	34.75	36.55	36.55	36.0	35.6	35.8
SMA NEGERI 3 BANDUNG	36.7	37.95	38.0	37.3	37.5	36.9
SMA NEGERI 4 BANDUNG	33.45	36.1	36.1	34.6	34.6	34.9
SMA NEGERI 5 BANDUNG	35.5	36.95	37.0	35.8	36.0	36.1
SMA NEGERI 6 BANDUNG	30.85	33.85	32.8	33.2	30.0	32.9
SMA NEGERI 7 BANDUNG	28.15	31.85	30.0	31.0	31.4	32.6
SMA NEGERI 8 BANDUNG	35.35	32.1	34.4	36.1	36.2	36.3

SMA NEGERI 9 BANDUNG	30.8	33.95	33.1	34.2	29.5	33.4
SMA NEGERI 10 BANDUNG	29.45	32.15	31.1	30.9	30.2	33.3
SMA NEGERI 11 BANDUNG	31.5	35.1	33.9	32.6	33.7	34.1
SMA NEGERI 12 BANDUNG	29.7	33.25	32.9	33.1	33.3	35.0
SMA NEGERI 13 BANDUNG	25.95	31.05	33.6	32.4	27.4	32.0
SMA NEGERI 14 BANDUNG	30.35	31.2	32.1	30.9	31.2	33.9
SMA NEGERI 15 BANDUNG	29.05	29.55	28.0	30.3	29.7	32.6
SMA NEGERI 16 BANDUNG	24.35	20.1	26.0	28.2	27.8	32.0
SMA NEGERI 17 BANDUNG	26.1	30.2	32.2	29.4	26.7	30.4
SMA NEGERI 18 BANDUNG	24.55	28.55	29.9	28.5	26.3	30.5
SMA NEGERI 19 BANDUNG	25.55	28.35	30.0	28.3	28.1	31.6
SMA NEGERI 20 BANDUNG	33.9	35.45	34.7	34.7	34.5	35.2
SMA NEGERI 21 BANDUNG	22.65	26.6	27.9	28.3	26.5	30.1
SMA NEGERI 22 BANDUNG	31	33.75	32.5	32.3	32.2	33.9
SMA NEGERI 23 BANDUNG	27.9	31.8	34.0	31.6	30.9	33.7
SMA NEGERI 24 BANDUNG	32.65	36.15	36.2	33.5	34.5	35.4

SMA NEGERI 25 BANDUNG	26.35	30.65	32.0	29.8	29.1	32.7
SMA NEGERI 26 BANDUNG	21.1	26.35	32.6	29.1	27.3	31.6
SMA NEGERI 27 BANDUNG	23.9	25.55	30.5	30.5	26.6	30.3

Sumber : ppdb.bandung.go.id

Calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi tentu akan memilih sekolah favorit begitupun sebaliknya calon peserta didik yang nilainya kurang akan memilih sekolah yang biasa. Fenomena seperti itu membuat terbentuknya dikotomi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Ketimpangan kualitas *input* SMAN Kota Bandung sangat terlihat. Beberapa sekolah memiliki *passing grade* yang besar karena kualitas *input* yang bagus. Tidak sedikit pula sekolah yang memiliki *passing grade* rendah karena memang kualitas *input* yang kurang baik. Terdapat anak usia sekolah yang dekat dengan sekolah akan tetapi karena dia tidak memenuhi kualifikasi sekolah sehingga dia harus bersekolah yang lokasinya jauh dari rumahnya tentu biaya yang dikorbankan akan lebih tinggi baik itu materi maupun waktu. Padahal setiap orang memiliki hak yang sama akan pendidikan.

Dalam suatu Sekolah Menengah Atas tentu domisili peserta didik berbeda-beda. Meskipun dalam satu kota, yakni Kota Bandung tentu peserta didik memiliki domisili yang berbeda serta tidak sedikit pula domisili peserta didik jauh dari lokasi sekolah. Hal itu akan berpengaruh kepada moda transportasi dan waktu tempuh peserta didik menuju sekolah. Lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal tentu akan menambah kemacetan di Kota Bandung. Setiap pagi siswa sekolah berangkat dari rumah ke sekolah dengan jarak tempuh yang jauh sehingga butuh waktu lebih untuk sampai ke sekolah. Moda transportasi yang digunakan siswa untuk pergi ke sekolah Antara lain angkutan umum, diantar orang tua, atau membawa kendaraan pribadi. Jenis kendaraan pribadi yang digunakan pun bermacam ada yang menggunakan mobil ataupun motor. Dengan begitu setiap pagi atau jam masuk sekolah jalan akan menerima beban lebih sehingga menimbulkan kepadatan kendaraan.

Kemacetan ini terjadi karena diakibatkan oleh adanya ketidak seimbangan antara suply jaringan transportasi dengan demand perjalanan orang dan barang di wilayah perkotaan tertentu.

Tabel 1.2

Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Bandung Tahun 2011-2013

No	Jenis Kendaraan	Tahun (unit)		
		2011	2012	2013
1.	Sepeda motor	703.827	784.726	859.411
2.	Mobil penumpang :			
	Umum	1.582	1.768	1.977
	Pribadi	71.014	72.777	74.445
3.	Mobil barang :			
	Umum	1.409	1.503	1.560
	Pribadi	61.440	61.887	63.314

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung

Selain itu, berdasarkan hasil kajian Lalu Lintas yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2018, menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Bandung pada setiap ruas jalan termasuk kedalam kategori C, D, E, dan F. Hal ini berarti bahwa kondisi arus lalu lintas atau volume pada suatu ruas jalan melebihi kapasitas jalan, sehingga mengakibatkan terhambatnya arus pada suatu ruas jalan (kemacetan).

Tabel 1.3

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas dan Level of Service Berdasarkan Wilayah Kerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2018

No	Ruas Jalan	V/C ratio (smp/jam)	Level of Service
1.	Jl. Dr. Djundjungan	0,96	E
2.	Jl. Abdurachman Shaleh	0.81	D
3.	Jl. Andir	0.95	E
4.	Jl. Kebon Jati	0.69	C
5.	Jl. HOS Cokroaminoto	0.93	E

6.	Jl. Jendral Sudirman	1.01	F
7.	Jl. Cihampelas	0.93	E
8.	Jl. Merdeka	0.81	D
9.	Jl. Asia Afrika	0.80	D
10.	Jl. Sunda	0.97	E
11.	Jl. Achmad Yani	0.82	D
12.	Jl. Jakarta	0.46	C
13.	Jl. Ibrahim Adjie	0.88	E
14.	Jl. Buah Batu	0.98	E
15.	Jl. Otto Iskandar	0.86	E
16.	Jl. Pasir Kota	0.91	E
17.	Jl. Jamika	0.95	E
18.	Jl. Cibaduyut	0.89	E
19.	Jl. Ciwastra	0.93	E
20.	Jl. Cibiru	0.92	E

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung (2018)

Keterangan :

0,0 - 0,19 : Kategori A (Sangat Baik) : Arus bebas, volume rendah, kecepatan tinggi

0,20 – 0,44 : Kategori B (Baik) : Arus stabil, volume agak tinggi, kecepatan sedang

0,45 – 0,69 : Kategori C (Sedang) : Arus stabil, volume tinggi, kecepatan dibatasi

0.70 – 0,84 : Kategori D (Buruk) : Arus mendekati tidak stabil, volume tinggi, kecepatan menurun, kenyamanan rendah

0,85 – 1,00 : Kategori E (Sangat Buruk) : Arus tidak stabil, volume mendekati kapasitas jalan, kendaraan sering berhenti

>1,0 : Kategori F (Sangat Buruk Sekali) : arus tertahan, kecepatan sangat rendah, antrian kendaraan panjang

Maka dari itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Ihsan Khoirul Anam, 2019

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menjelaskan bahwa Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan sistem zonasi sekolah. Setiap sekolah diwajibkan untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah tersebut dengan persentasi 90 % dari keseluruhan peserta didik yang diterima. Dengan adanya sistem zonasi sekolah tidak menutup peluang peserta didik untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan (favorit). Hal ini karena terdapat 10 % kuota sekolah dengan sistem lain yaitu sistem jalur prestasi diluar zona terdekat dari sekolah sebanyak 5 % dan sistem jalur berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik dan terjadi bencana alam/sosial sebanyak 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima pada satu sekolah. Salah satu tujuan dari sistem zonasi ini yaitu menghilangkan diskriminasi antara sekolah favorit dan tidak favorit. Pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2 dijelaskan :

- 1.1.1 PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- 1.1.2 Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Tabel 1.4

Wilayah Zonasi Sekolah

NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH
SMA Negeri 1	Coblong	A
SMA Negeri 2	Coblong	A
SMA Negeri 15	Sukajadi	A
SMA Negeri 19	Coblong	A
SMA Negeri 10	Cibeunying Kidul	B
SMA Negeri 14	Cibeunying Kidul	B

SMA Negeri 20	Bandung Wetan	B
SMA Negeri 3	Sumur Bandung	C
SMA Negeri 5	Sumur Bandung	C
SMA Negeri 7	Lengkong	C
SMA Negeri 8	Lengkong	D
SMA Negeri 11	Regol	D
SMA Negeri 22	Lengkong	D
SMA Negeri 4	Andir	E
SMA Negeri 17	Babakan Ciparay	E
SMA Negeri 18	Bojongloa Kaler	E
SMA Negeri 6	Cicendo	F
SMA Negeri 9	Cicendo	F
SMA Negeri 13	Andir	F
SMA Negeri 12	Kiaracondong	G
SMA Negeri 16	Kiaracondong	G
SMA Negeri 21	Buahbatu	G
SMA Negeri 25	Rancasari	G
SMA Negeri 23	Antapani	H
SMA Negeri 24	Ujung Berung	H
SMA Negeri 26	Cibiru	H
SMA Negeri 27	Gedebage	H

Sumber : ppdb.bandung.go.id

Peraturan mengenai sistem zonasi sekolah dibuat dengan penuh pertimbangan akan tetapi pada implementasinya masyarakat tidak hanya menerima akan peraturan yang telah di buat. Banyak juga masyarakat yang kurang menerima peraturan tersebut, padahal peraturan itu sudah dipertimbangkan baik buruknya. Karena berbeda kepentingan dan merasa dirugikan terhadap dirinya akhirnya melakukan sebuah penolakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Resistensi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang akan menghasilkan peta tingkat dan bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat di Kota Bandung terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri. Maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Mengapa terjadi resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung?
- 1.2.3 Bagaimana solusi dari resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Menganalisis motivasi terjadinya resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung.
- 1.3.2 Menganalisis bentuk resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung.
- 1.3.3 Menganalisis solusi dari resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber data dan informasi mengenai resistensi masyarakat dalam implementasi sistem zonasi sekolah menengah atas di Kota Bandung yang selanjutnya bermanfaat untuk pemerintah dan peneliti lain.

1.4.2 Secara praktis

- 1.4.2.1 Sebagai sarana sosialisasi tentang sistem zonasi sekolah agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mematuhi peraturan sistem zonasi sekolah.
- 1.4.2.2 Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Kota Bandung untuk lebih mempersiapkan diri terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 1.4.2.3 Memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam menjalankan amanat Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 456 Tahun 2018.
- 1.4.2.4 Memberikan informasi dan data mengenai dampak dari resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah di Kota Bandung.

1.5 Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “**Resistensi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandung**” harus ada batasan pembahasan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran kata-kata, sehingga akan dijabarkan penulis sebagai berikut :

- 1.5.1 Resistensi masyarakat sendiri merupakan sebuah penolakan atau rasa kurang menerima dari masyarakat terhadap sesuatu kejadian atau fenomena. Pada penelitian ini rasa kurang menerima terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah yang di rasakan oleh masyarakat. Masyarakat disini merupakan orang tua siswa yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat atas atau orang tua yang memiliki anak usia sekolah pada saat kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah. Tingkat resistensi dibagi dalam 5 tingkatan yaitu sangat lemah 0 – 20, lemah 21 – 40, cukup 41 - 60, kuat 61 – 80, dan sangat kuat 81 - 100.
- 1.5.2 Sistem zonasi sekolah menengah atas negeri merupakan suatu kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Bandung. Kebijakan ini mengatur sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Sekolah menengah atas negeri pada penelitian ini diartikan sebagai sekolah tingkat atas yang berstatus negeri yang terdapat di Kota Bandung dengan jumlah 27 sekolah.

1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagian untuk menjelaskan tentang sistematika skripsi yang di buat. Sistematika skripsi terdiri dari tiap bab yang ada pada skripsi. Adapun bab yang terdapat pada skripsi yaitu lima bab dan daftar pustaka, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian, dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, hukum-hukum, rumus-rumus, dan model-model yang relevan dengan bidang yang akan dikaji pada penelitian ini. Teori-teori tersebut menjadi penguat dalam penelitian. Adapun pada penelitian ini yang menjadi kajian pustaka diantaranya konsep resistensi, penerimaan peserta didik baru, dan pemerataan kualitas pendidikan. Pada sub bab tersebut terdapat beberapa sub lagi yang menjadi pendukung sub bab tersebut. Selain itu, pada bab ini juga terdapat daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai lokasi metode penelitian, pendekatan geografi, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpul data, alat pengumpul data, teknik pengolah data, teknik analisis data, desain penelitian, dan bagan alur penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai temuan lapangan dan kemudian dianalisis dan dibahas secara mendalam sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, rekomendasi serta implikasi terhadap pertimbangan keputusan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi mengenai daftar referensi berupa buku-buku, jurnal, dokumen pemerintahan/instansi, dan lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.